



# **LAPORAN MANAJEMEN RISIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR**

***TRIWULAN IV TAHUN 2025***







Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Denpasar kreatif berwawasan budaya dan keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi pembangunan daerah yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju

#### B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar;
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/874/HK/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Nomor 800.1.5.1/ 19 /2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025

#### C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal – hal yang membutuhkan solusi / rekomendasi kepada unit kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

#### D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025.

## **BAB II**

### **Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

#### **A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV**

##### **1. Identifikasi Risiko**

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 53 risiko, dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.

##### **2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko**

Dari 53 risiko yang teridentifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 9 risiko (16.98 % dari 53 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 2.

b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 9 risiko atau 16.98% dari jumlah/ populasi risiko prioritas.

c. Sebanyak 9 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah / populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 3.

#### **B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan IV**

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan IV sebanyak 9 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4.

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan IV sebanyak 9 atau 100% dari 9 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5.

3. Terdapat 9 kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang

seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya

### **BAB III**

#### **Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja Organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Alamat perusahaan tidak sesuai pada yang tercantum pada NIB sehingga perusahaan yang akan diawasi tidak ditemukan
- b. Perusahaan tidak melaporkan perpindahan lokasi usaha sehingga saat di survey perusahaan sudah tidak ada di lokasi tersebut
- c. Kurang validnya data UMKM pada saat survey lapangan dilakukan
- d. Adanya keengganan pemohon dalam mengisi Survey Kepuasan Masyarakat secara online.

## **BAB V**

### **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar telah melakukan analisis manajemen resiko di setiap program/kegiatan yang ada. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Denpasar terdapat 53 risiko yang teridentifikasi dan 9 diantaranya merupakan risiko prioritas.

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan strategi sebagai tindak lanjut monitoring risiko. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perijinan Keliling

Perijinan keliling dilaksanakan untuk mempercepat proses perijinan yang diajukan, sehingga masyarakat yang membutuhkan izin tidak perlu datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka setiap pengaduan dari masyarakat harus segera ditindak lanjuti.

3. Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan penanaman modal dilakukan agar perusahaan melaporkan LKPM tepat waktu sehingga meningkatkan realisasi investasi di Kota Denpasar.

## **BAB IV**

### **Monitoring Risiko dan RTP**

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan IV pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6.

Analisis manajemen resiko harus dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dari resiko yang muncul dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan.

Diharapkan setiap Program/ kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Denpasar, 2 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran 1

FORM 4  
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2025				
Tujuan Strategis	: 1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar 2. Optimalnya Pelayanan Publik				
Urusan Pemerintahan	: Bidang Penanaman Modal				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
1	Sulit menemukan UMKM yang memproduksi secara kontinyu	RSO.25.18.23.01	2	5	10
2	Pendataan UMKM belum optimal	RSO.25.18.23.02	4	2	8
3	Kurang maksimalnya proses pelaporan LKPM	RSO.25.18.23.03	5	4	20
4	Masih Adanya Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak tepat waktu	RSO.25.18.23.04	4	3	12
5	Pengembangan dan pemanfaatan data pada sistem perizinan belum maksimal	RSO.25.18.23.05	3	2	6
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				
1	pemanfaatan peta potensi	ROO.25.18.23.01	2	2	4
2	Proses penyusunan Peta Potensi tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.02	2	2	4
3	realisasi investasi tidak maksimal	ROO.25.18.23.03	4	2	8
4	Promosi investasi kurang maksimal	ROO.25.18.23.04	4	2	8
5	Proses pelaporan LKPM kurang maksimal	ROO.25.18.23.05	5	4	20
6	Pelayanan Pengaduan Masyarakat kurang optimal	ROO.25.18.23.06	4	3	12
7	Pelayanan perizinan belum optimal	ROO.25.18.23.07	3	3	9
8	Risiko penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan	ROO.25.18.23.08	4	4	16
9	Penyelesaian pekerjaan pengembangan sistem tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.09	3	2	6
10	Sistem yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan OPD	ROO.25.18.23.10	3	2	6
11	Layanan kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.18.23.11	3	3	9

12	laporan kinerja tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.12	4	4	16
13	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.18.23.13	4	4	16
14	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	ROO.25.18.23.14	4	4	16
15	ketidak sesuaian materi pembelajaran	ROO.25.18.23.15	4	3	12
16	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.18.23.16	3	4	12
17	Pengadaan Tidak Selesai Tepat Waktu	ROO.25.18.23.17	2	2	4
18	peningkatan biaya operasional	ROO.25.18.23.18	3	4	12
19	Peningkatan biaya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROO.25.18.23.19	5	5	25
20	Kerusakan bangunan gedung	ROO.25.18.23.20	5	5	25
21	Kerusakan bangunan yang berulang	ROO.25.18.23.21	5	5	25
22	Risiko pelaksanaan PBJ melalui e-purchasing	ROO.25.18.23.22	4	3	12
23	ketidakakuratan data yang disajikan oleh pihak ketiga	RF.25.18.23.01	2	4	8
24	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.02	3	1	3
25	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.03	2	1	2
26	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.04	3	1	3
27	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.05	2	1	2
28	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.06	3	1	3
29	Pembuatan NIB yang tidak sesuai dengan ketentuan	RF.25.18.23.07	2	4	8
30	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.08	3	1	3
31	Pelayanan Perijinan yang belum transparan	RF.25.18.23.09	4	3	12

32	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.10	3	1	3
33	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.11	2	1	2
34	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.12	3	1	3
35	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.13	2	1	2
36	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.14	3	1	3
37	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.15	2	1	2
38	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.16	3	1	3
39	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.17	2	1	2
40	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.18	3	1	3
41	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.19	2	1	2
42	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.20	3	1	3
43	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.21	2	1	2
44	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.22	3	1	3
45	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.23	2	1	2

46	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.24	3	1	3
47	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.18.23.25	2	1	2
48	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti - bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.18.23.26	3	1	3

Denpasar, 2 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.  
NIP. 19720924 199803 1 008

## Lampiran 2

Form 5  
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		2025				
Tujuan Strategis		1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar 2. Optimalnya Pelayanan Publik				
Urusan Pemerintahan		Bidang Penanaman Modal				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis</b>						
<b>II Risiko Strategis OPD</b>						
1	Kurang maksimalnya proses pelaporan LKPM	RSO.25.18.23.03	20	Kepala Dinas	kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap tata cara pelaporan LKPM	kurang maksimalnya pencapaian nilai realisasi investasi
<b>III Risiko Operasional OPD</b>						
1	Proses pelaporan LKPM kurang maksimal	ROO.25.18.23.05	20	Kepala Dinas	1. alamat perusahaan tidak sesuai dengan data OSS 2. adanya beberapa perusahaan fiktif 3. sarana prasarana kurang memadai	nilai realisasi investasi menjadi kurang optimal
2	Risiko penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan	ROO.25.18.23.08	16	Kepala Dinas	Koordinasi dengan OPD teknis belum dilaksanakan dengan maksimal	Penerbitan ijin tidak sesuai dengan janji layanan
3	laporan kinerja tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.12	16	Kepala Dinas	Adanya keterlambatan dalam mendapatkan data dari pusat	Menurunnya nilai SAKIP
4	Penyediaan gaji dantunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.18.23.13	16	Kepala Dinas	1. Terjadinya mutasi pegawai 2. Pengangkatan PPPK 3. Pegawai pensiun	Terganggunya pembayaran gaji
5	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	ROO.25.18.23.14	16	Kepala Dinas	Kesalahan perhitungan dalam pembuatan daftar gaji	Terganggunya proses pembayaran gaji pegawai
6	Peningkatan biaya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROO.25.18.23.19	25	Kepala Dinas	Tidak terkontrolnya pemakaian sumber daya jasa penunjang kantor	Tertundanya pembayaran tagihan air, listrik dan telpon akibat anggaran tidak tersedia
7	Kerusakan bangunan gedung	ROO.25.18.23.20	25	Kepala Dinas	Usia bangunan yang sdh lebih dari 10 tahun	Terganggunya optimalisasi pelayanan publik
8	Kerusakan bangunan yang berulang	ROO.25.18.23.21	25	Kepala Dinas	Petugas tidak cermat dalam melakukan perawatan gedung	Terganggunya optimalisasi pelayanan publik



Lampiran 3

Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: 1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar : 2. Optimalnya Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis</b>							
<b>II Risiko Strategis OPD</b>							
1	Kurang maksimalnya proses pelaporan LKPM	RSO.25.18.23.03	Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Meningkatkan kemampuan petugas yang turun ke lapangan dalam memberikan pemahaman tentang kelengkapan dokumen perijinan maupun tata cara pelaporan LKPM	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	DPMPPTSP Kota Denpasar dan pelaku usaha	1 tahun
<b>III Risiko Operasional OPD</b>							
1	Proses pelaporan LKPM kurang maksimal	ROO.25.18.23.05	Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Meningkatkan kemampuan petugas yang turun ke lapangan dalam memberikan pemahaman tentang kelengkapan dokumen	1. Meningkatkan sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha 2. Konfirmasi via telpon ataupun whatsapp	Kepala Dinas	1 tahun
2	Risiko penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan	ROO.25.18.23.08	Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait	Menyediakan media konsultasi dan pengaduan kepada masyarakat	Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis	Kepala Dinas	1 tahun
3	laporan kinerja tidak tepat waktu	ROO.25.18.23.11	Melakukan Koordinasi dengan Pusat terkait percepatan rilis data	Melakukan koordinasi secara terus menerus untuk memastikan data dapat diperoleh tepat waktu	Memantau ketersediaan data setiap triwulan	Kepala Dinas	1 tahun

4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.18.23.12	Melakukan koordinasi dengan BPKAD	Melakukan penyusunan perencanaan anggaran secara seksama	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait gaji	Kepala Dinas	1 tahun
5	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	ROO.25.18.23.13	Melakukan koordinasi dengan BPKAD	Melakukan penyusunan perencanaan anggaran secara seksama	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait pembuatan daftar gaji	Kepala Dinas	1 tahun
6	Peningkatan biaya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROO.25.18.23.18	Mematikan komputer dan alat elektronik lainnya jika tidak digunakan	Memasang himbauan secara tertulis di masing-masing perangkat elektronik guna mengingatkan pengguna melakukan penghematan energi	Menghimbau seluruh OPD yang berada dalam GSD untuk melaksanakan penghematan energi	Kepala Dinas	1 tahun
7	Kerusakan bangunan gedung	ROO.25.18.23.19	Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung secara berkala	Melakukan pengecekan kondisi gedung secara rutin	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Kepala Dinas	1 tahun
8	Kerusakan bangunan yang berulang	ROO.25.18.23.20	Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung secara berkala	Melakukan pengecekan kondisi gedung secara rutin	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Kepala Dinas	1 tahun

Denpasar, 2 Januari 2026  
Kepala Dinas Perencanaan Modal dan PTSP  
Kota Denpasar

*Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.*  
NIP. 19710924 199803 1 008



Lampiran 4

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		Pemerintah Kota Denpasar 2025 1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar 2. Optimalnya Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis</b>							
<b>II Risiko Strategis OPD</b>							
1	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Narasumber dari perwakilan BKPM RI	Pelaku usaha	6 kali	6 kali	
<b>III Risiko Operasional OPD</b>							
1	1. Meningkatkan sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha 2. Konfirmasi via telpon ataupun whatsapp	melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Narasumber dari perwakilan BKPM RI	Pelaku usaha	6 kali	6 kali	
2	Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis	Berkoordinasi langsung secara lisan	OPD Teknis terkait	Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
3	Memantau ketersediaan data setiap triwulan	Pengecekan pada sistem yang disediakan oleh BKPM RI, berkoordinasi secara lisan melalui pelaksanaan rapat/pertemuan dengan DPMPPTSP Provinsi Bali	OPD Teknis terkait	Perencana pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 Tahun	1 Tahun	
4	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait gaji	Berkoordinasi langsung secara lisan, RKA Perangkat Daerah	OPD Teknis terkait	Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
5	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait pembuatan daftar gaji	Berkoordinasi langsung secara lisan	OPD Teknis terkait	Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
6	Menghimbau seluruh OPD yang berada dalam GSD untuk melaksanakan penghematan energi	Himbauan dalam bentuk Media Cetak	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Seluruh Pegawai yang bertugas pada Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
7	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Himbauan dalam bentuk Media Cetak	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Seluruh Pegawai yang bertugas pada Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	

8	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Himbauan dalam bentuk Media Cetak	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Seluruh Pegawai yang bertugas pada Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	
---	--	-----------------------------------	--------------------------------	---	---------	---------	--



Denpasar, 2 Januari 2026  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Prada Rurus, ST  
 NIP. 197209241998031008

Lampiran 5

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	2025					
Tujuan Strategis	1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar 2. Optimalnya Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan	Bidang Penanaman Modal					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis</b>						
<b>II Risiko Strategis OPD</b>						
1	Meningkatkan sosialisasi LKPM dan pengawasan penanaman modal	membentuk tim untuk turun lapangan secara langsung dan pemantauan melalui	Kepala Dinas	1 Tahun	1 Tahun	
<b>III Risiko Operasional OPD</b>						
1	1. Meningkatkan sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha 2. Konfirmasi via telpon ataupun whatsapp	membentuk tim untuk turun lapangan secara langsung dan pemantauan melalui sistem	Kepala Dinas	1 Tahun	1 Tahun	
2	Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis	Mengecek pengaduan/ permasalahan yang dimiliki masyarakat terkait	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
3	Memantau ketersediaan data setiap triwulan	Mengecek pada sistem yang disediakan oleh BKPM RI, maupun melakukan koordinasi dengan DPMPPTSP Provinsi Bali	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
4	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait gaji	Menyusun RKA untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
5	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait pembuatan daftar gaji	Menyusun RKA untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
6	Menghimbau seluruh OPD yang berada dalam GSD untuk melaksanakan penghematan energi	Melakukan monitoring secara berkala	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
7	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi BMD	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	
8	Menggunakan barang milik daerah sebaik-baiknya	Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi BMD	Kepala Dinas	1 tahun	1 tahun	

Denpasar, 2 Januari 2026  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kota Denpasar  
  
 Ida Bagus Bemy Pidada Rurus, ST.  
 NIP. 19720924 199803 1 008



## Lampiran 6

### PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar									
Tahun Penilaian		: 2025									
Tujuan Strategis		1. Optimalnya Penyelenggaraan Investasi di Kota Denpasar 2. Optimalnya Pelayanan Publik									
Urusan Pemerintahan		: Bidang Penanaman Modal									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket	
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak						
I	Risiko Strategis Pemda										
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL								
II	Risiko Strategis OPD										
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL								
III	Risiko Operasional OPD										
	Masalah/Risiko Baru		NIHIL								

Denpasar, 2 Januari 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.  
NIP. 19720924 199803 1 008

